



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH TAHUN 2022



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2022

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan hidayah serta karunia-Nya, kita telah diberi kekuatan dan kemampuan dalam mengemban tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai wujud pengabdian pada masyarakat dengan berpijak pada asas transparansi, akuntabel.

Sebagai wujud dari asas transparansi dan akuntabel tersebut, segala sesuatu yang telah kita laksanakan dalam rangka menjalankan Program Pembangunan, sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh wajib untuk dievaluasi dan dilaporkan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana optimalisasi kinerja pembangunan yang sudah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan. Laporan kinerja ini sekaligus merupakan bahan evaluasi dari pelaksanaan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini dapat diselesaikan, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaannya, terimakasih.

Payakumbuh, Januari 2023  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Payakumbuh



**ERIZON, S.Sos, M.M**  
NIP. 19710627 199803 1 004

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>I</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>li</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum .....	2
C. Tugas dan Fungsi .....	2
D. Isu Strategis .....	5
E. Landasan Hukum .....	5
F. Sistematika .....	6
<b>BAB II Perencanaan Kinerja</b>	
A. Rencana Strategis .....	8
B. Indikator Kinerja Utama.....	11
C. Perjanjian Kinerja 2020 .....	12
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b>	
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	14
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran strategis .....	17
<b>BAB IV Penutup</b>	<b>33</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur legitimate sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LkjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Badan**

Dalam rangka memberikan pembinaan dan pengembangan dibidang penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata serta memberikan pedoman dan pengarahannya dalam penanggulangan bencana, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No: 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh dan disusul dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh, maka tugas dan fungsi BPBD dapat dijabarkan sebagai berikut :

## **1. Tugas pokok**

- a) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

## **2. Fungsi**

- a) Merumuskan kebijakan teknis dibidang kewaspadaan dan pembinaan masyarakat.
- b) Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

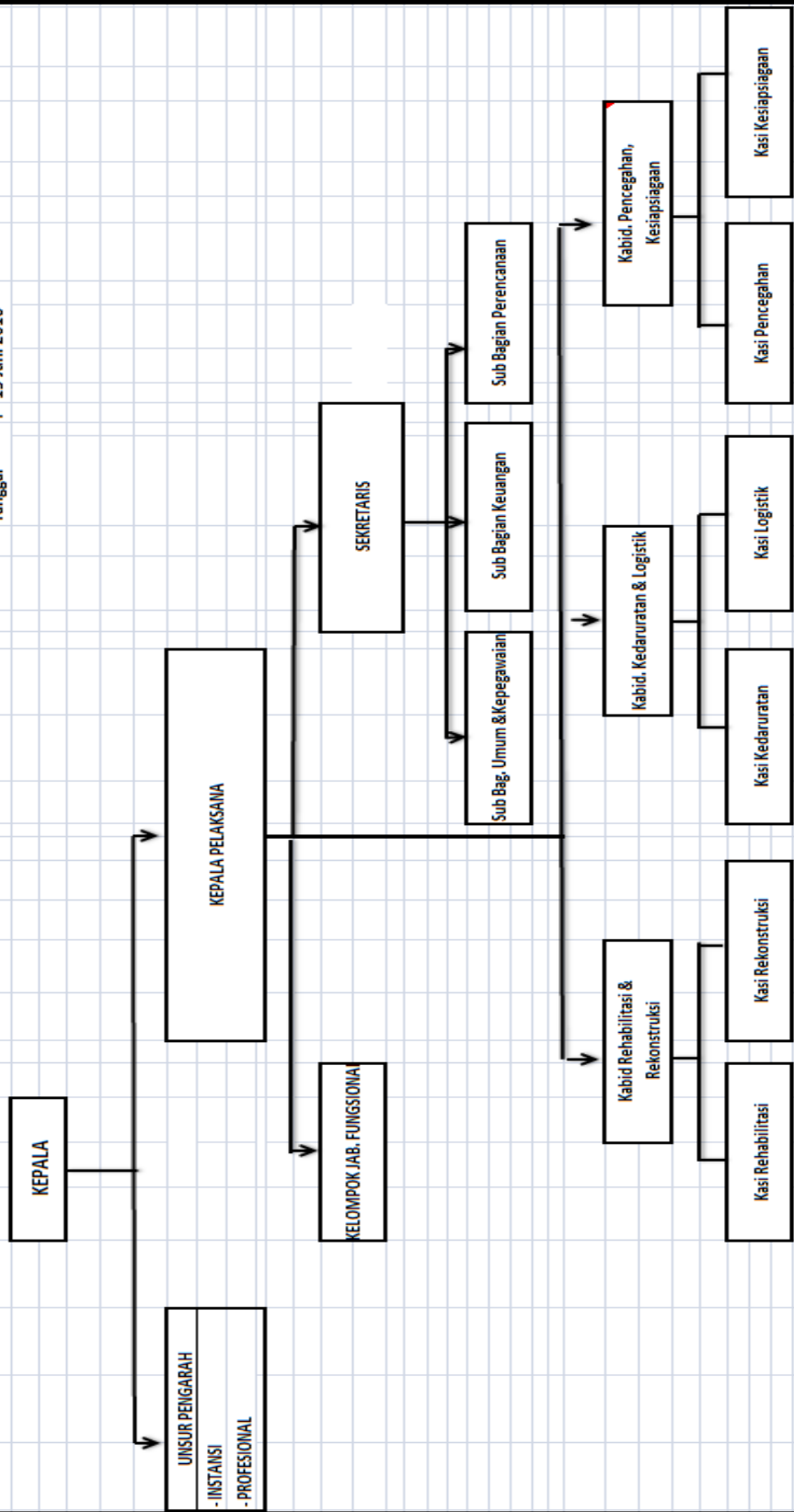
STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Payakumbuh

Nomor : 18 Tahun 2016

Tanggal : 15 Juni 2016



#### **D. Isu Strategis**

Sebagai komponen Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berperan dalam pembinaan bidang penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dihadapkan pada tantangan-tantangan yang tidak ringan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi, namun demikian terdapat juga faktor strategis yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana terdapat juga faktor positif didalamnya yang diidentifikasi sebagai kekuatan yang signifikan dan mampu mendorong peningkatan kinerja.

Isu strategis pada urusan penanggulangan bencana adalah perlunya integrasi kegiatan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana secara seimbang dan sinergis.

#### **E. Landasan Hukum**

LkjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022.

## **F. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Ringkasan/Ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
  6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
  8. Seluruh Capaian Kinerja agar dilengkapi dengan dokumen foto secukupnya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Prestasi dan Penghargaan

#### BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

##### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses

penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh dimuat program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Payakumbuh dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju ***“Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang”***.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah :***“Terwujudnya Penanggulangan Bencana Yang Cepat, Tepat, dan Profesional”***.

## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 yakni :***“Terciptanya Sistem Penanggulangan Bencana Yang Handal”***

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Adapun tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh : ***“Mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan, terarah dan terintegritas dalam penanggulangan bencana secara profesional”***.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Yang terdiri dari :

- 1. Meningkatnya pelayanan terhadap penanggulangan bencana**
- 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh**

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2017-2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan, terarah, dan terintegritas dalam penanggulangan bencana	Peningkatan pelayanan terhadap penanggulangan bencana	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	%	16,24	17,34	74,47	74,47	74,47	100
			Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100
2		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh	Hasil penilaian AKIP BPBD oleh Inspektorat	Nilai	BB	BB	A	A	A	A

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Revormasi Birokrasi di Pemerintah Kota Payakumbuh, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Peningkatan pelayanan terhadap penanggulangan bencana	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	%	Mendorong peran serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	Jumlah kelompok/kelurahan yang siap menghadapi bencana dibagi jumlah kelompok atau kelurahan di Kota Payakumbuh dikali seratus persen	BPBD
		Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	%	Untuk menyiapkan masyarakat menghadapi penanganan bencana	Jumlah Kejadian bencana yang ditangani sesuai standar dibagi jumlah seluruh kejadian bencana pada tahun tertentu dikali seratus persen	BPBD
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh	Hasil penilaian AKIP BPBD oleh Inspektorat	Nilai	Kesiapan dalam mengatasikejadian	Nilai yang diberikan Inspektorat	Inspektorat

### C. Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kota Payakumbuh Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan pelayanan terhadap penanggulangan bencana	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	100%
		Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh	Hasil penilaian AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh Inspektorat	A

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.120.059.088	
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 616.261.950	
	<b>J U M L A H</b>	<b>Rp 4.736.321.038</b>	

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017- 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh.

#### A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

**Tabel 3.2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	>90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, maka setiap instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi Pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Payakumbuh. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama,

dalam melakukan reuiu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Nilai Rata-Rata	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase kelompok masyarakat didaerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	%	100	100	100	100	Sangat Baik
2	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	%	100	100	100		
3	Hasil penilaian AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh inspektorat	Nilai	A	A	100		

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 terdiri dari 3 indikator yaitu ; a) Persentase kelompok masyarakat didaerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana dengan target 100% dari kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh terealisasi 100% dan capaiannya 100%, b) Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dengan target 100% terealisasi 100% dan capaiannya 100%, c) Hasil penilaian AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh inspektorat dengan taget nilai A terealisasi A dan capaian 100%.Pencapaian 3 indikator ini didapat capaian rata-rata 100% dengan kategori **Sangat Baik**

## **B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak ( dua ) sasaran.

Maka pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

### Sasaran 1

#### Peningkatan Pelayanan Terhadap Penanggulangan Bencana

Dalam Peningkatan Pelayanan Terhadap Penanggulangan Bencana terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang salah satunya adalah persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana.

Salah satu cara untuk meningkatkan kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana adalah melalui masyarakat kelurahan Tangguh Bencana, yaitu kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Analisis Pencapaian Sasaran**  
**Terciptanya Masyarakat Tangguh Bencana**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2022	%
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Persentase kelurahan/kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	74,47	74,47	100	74,47	74,47	100%	100	100	100%	100%	100
Rata-rata Capaian Kinerja									100%			

Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa persentase kelurahan/kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Tahun 2020 (74,47%), Tahun 2021 (74,47%) dan Tahun 2022 (100%), hal ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis BPBD Tahun 2017-2022 serta target akhir tahun Renstra yaitu 100%. Kinerja pada sasaran terciptanya masyarakat tangguh bencana Tahun 2022 terealisasi sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% atau dengan capaian kinerja 100%. Realisasi kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar 100%.. target sudah dapat dipenuhi dan diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun agar seluruh kelurahan/kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana, karena dampak dari bencana alam sangat tinggi, bukan hanya kerusakan infrastuktur, sarana dan prasarana namun juga korban jiwa dan kerugian ekonomi.

Peningkatan yang sangat signifikan untuk capaian kinerja ini, dari sisi positifnya pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, dari 47 kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh sudah dapat diberikan pelatihan kepada kelompok siaga bencananya sebanyak 47 kelurahan tersebut.

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia, intensitas kejadian bencana cenderung terus mengalami peningkatan. Kejadian bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, dimana bencana banjir, angin puting beliung, dan longsor masih yang paling banyak terjadi. Faktor utama penyebab meningkatnya bencana hidrometeorologi adalah akibat perubahan iklim global dan degradasi lingkungan akibat ulah manusia (antropogenik). Pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali, urbanisasi dan kemiskinan ditengarai juga menjadi faktor lain yang menyebabkan meningkatnya ancaman dan risiko bencana hidrometeorologi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan program fasilitator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) sejak tahun 2012 sampai saat ini, di mana menurut data Direktorat Pemberdayaan

Masyarakat BNPB menyebutkan dari tahun 2012 s/d 2015 total ada 266 Destana di seluruh Indonesia, tahun 2012 ada 40 orang, tahun 2013 ada 58 orang, tahun 2014 ada 68 orang dan tahun 2015 ada 100 orang serta tahun 2016 ada 220 orang. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi risiko bencana.

Capaian kinerja sasaran terciptanya masyarakat tangguh bencana didukung oleh program penanggulangan bencana, dengan kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Output program dan kegiatan tersebut antara lain terlaksananya kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana, dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

### **Faktor pendorong keberhasilan pencapaian target kinerja pada Tahun 2022**

Pencapaian sasaran terciptanya masyarakat tangguh bencana termasuk kategori sangat baik dapat dilihat dari berbagai hal, seperti:

- a. Semakin meningkatnya kualitas infrastruktur dan faktor pendukung diantaranya peraturan atau regulasi terkait penanggulangan bencana, personil yang mempunyai kompetensi dan semangat yang tinggi serta sarana operasional, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan anggaran yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat
- c. Mendorong pergantian pola kerja berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi

yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada upaya peningkatan kualitas dan kualitas pelayanan penanggulangan bencana.

**Permasalahan yang dihadapi :**

- a. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana
- b. Masih kurangnya jumlah jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan interaksi sosial anggota masyarakat
- c. Masih kurangnya pengorganisasian masyarakat terlatih siaga bencana secara berkesinambungan
- d. Kurang optimalnya potensi dan sumberdaya untuk penanggulangan bencana

**Pemecahan Masalah/Rencana Aksi pada tahun berikutnya antara lain yaitu:**

- a. Meningkatkan ketangguhan dari faktor internal dan eksternal masyarakat untuk upaya-upaya pencegahan terjadinya bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- b. Modal sosial yang dominan di masyarakat (kekuatan tradisi, sosial budaya, rasa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) dapat mengarahkan kepada kentalnya komitmen bersama untuk bisa siaga dalam menghadapi bencana secara kolektif dan meningkatkan daya lenting pasca bencana.
- c. Meningkatkan keaktifan masyarakat dalam berbagai upaya penanggulangan bencana yang disediakan oleh Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.
- d. Meningkatkan solidaritas atau kebiasaan yang berlandaskan struktur budaya dan kewajiban humanis.
- e. Meningkatkan hubungan yang berdasarkan pada interaksi untuk mencapai tujuan tangguh menghadapi bencana.
- f. Mengurangi risiko bencana.

- g. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pemulihan pascabencana.
- h. Kelurahan/kelompok yang siap dalam menghadapi bencana menjadi fasilitator di masyarakat untuk berbagai pengalaman, tidak menggurui dan berkomunikasi dengan dua arah kepada masyarakat di sekitarnya.

Pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2020-2022**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target Akhir Renstra Tahun 2022
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	5	6	7	8	7	8	9
I	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	74,47%	74,47%	74,47%	74,47%	100	100	100%
II	Persentase Kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
III	Nilai IKM	83	83,25	89	87,91	89	90,57	90,57
IV	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80%	99,00%	80%	99,00%	80%	99,00%	99%
V	Persentase ASN dengan atribut lengkap	100%	99,10%	100%	99,10%	100%	99,10%	100%
VI	Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A

Dari tabel 3.5 dapat dilihat pada umumnya indikator kinerja program/kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh terdapat realisasi yang cukup baik. Hal ini karena semua indikator kinerja dari tahun 2020-2022 terlaksana dan mencapai target yang

telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Terkait hal tersebut di atas dapat dilihat juga gambaran tentang pelaksanaan program, kegiatan, anggaran dan output serta dampak terhadap capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Gambaran Program, Kegiatan, Anggaran dan Out Put Yang dihasilkan Tahun 2022**

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi			Output	Menujang /Kurang
				Anggaran	Anggaran (%)	Fisik (%)		
I	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	225.812.850	225.031.500	99,65	100	Penyelesaian Dokumen Kajian Resiko Bencana	Menunjang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	166.280.940	146.089.250	87,86	90,00	Terlaksananya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana sebanyak 200 Orang tersedianya peralatan perlindungan serta pengelolaan resiko bencana	Menunjang
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	224.168.160	202.497.500	90,33	97,50	Terlaksananya kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Menunjang

Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa kegiatan seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai target (100%). Menurut penyerapan anggaran yang paling tinggi terdapat pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana yaitu 100% dan yang paling rendah terdapat pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu sebesar 90,00%.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran terciptanya masyarakat tangguh bencana, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran**

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Peningkatan Pelayanan Terhadap Penanggulangan Bencana	1.1	Persentase kelompok masyarakat didaerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	%	100	100	100	Program penanggulangan bencana	616.261.950	573.618.250	93,08%
<b>CAPAIAN DARI INDIKATOR</b>							100				93,08
<b>TINGKAT EFISIENSI 100 %</b>											
<b>TINGKAT EFEKTIFITAS 100 %</b>											

Peningkatan pelayanan terhadap penanggulangan bencana upayanya banyak terkait dengan pelayanan tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penanganan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana. Tanggap darurat merupakan tahapan dari status keadaan darurat yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Pelayanan tanggap darurat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaiki dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pencapaian sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Penanggulangan Bencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Sasaran**  
**Peningkatan Pelayanan Terhadap Penanggulangan Bencana**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Target Akhir Renstra	%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja											100%		

Dari tabel 3.8 dapat dilihat bahwa realisasi kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai dengan standar kapasitas penanggulangan bencana sesuai dengan target 100% yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2017-2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh sebesar 100% dengan capaiannya 100%. Sedangkan realisasi kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai dengan standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2022 dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2021 sebesar 100% serta dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 tetap sama 100%.

Faktor pendukung keberhasilan :

- a. Wilayah Kota Payakumbuh merupakan daerah yang tidak begitu luas dan termasuk kategori kota kecil.
- b. Cukup baiknya tanggungjawab, kemampuan/kompetensi dan kejelasan petugas pelayanan kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh.

Permasalahan yang dihadapi :

- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan
- b. Masih kurangnya jaminan kepastian hukum, waktu dan biaya.
- c. Serta prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang tidak konsisten dalam pelayanan kebencanaan yang terkoordinasi dengan stakeholder terkait.

Pemecahan Masalah/Rencana Aksi :

- a. Melakukan pelatihan bagi para petugas penanggulangan bencana dalam menangani bencana, dimaksudkan para petugas penanggulangan bencana dapat dengan sigap, cepat dan tanggap terhadap penanggulangan bencana.
- b. Pemerintah harus terus memperhatikan Dana Operasional yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan publik, khususnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh.
- c. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh segera mungkin membenahi sarana dan prasarana serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas atau instansi lain yang berhubungan. Misalnya koordinasi dengan Dinas Perhubungan, PDAM, PT Telkom, PLN, Kepolisian, Kesehatan dan lain-lain guna menunjang pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
- d. Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan yang berkelanjutan dan intens kepada

masyarakat akan penanggulangan bencana baik melalui media cetak ataupun media elektronik.

Capaian kinerja sasaran peningkatan pelayanan terhadap penanggulangan bencana didukung oleh program penanggulangan bencana, dengan kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Output program dan kegiatan tersebut antara lain terlaksananya kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Gambaran Program, Kegiatan, Pagu, Realisasi Anggaran, Output serta Dampak**

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
I	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan bencana	225.812.850	225.618.250	Terlaksananya pembuatan dokumen kajian resiko bencana	Menunjang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	166.280.940	146.089.250	Terlaksananya pelatihan, pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan	Menunjang
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	224.168.160	202.497.500	Terlaksananya pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana	Menunjang

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran peningkatan kualitas pelayanan terhadap penanggulangan bencana, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10

## Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Kualitas Pelayanan Kebencanaan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Peningkatan pelayanan terhadap penanggulangan bencana	1.1 Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	%	100	100	100	Program Penanggulangan Bencana	616.261.950	573.618.250	93,08%
<b>CAPAIAN DARI INDIKATOR</b>						100				93,08
				<b>TINGKAT EFISIENSI 100%</b>						
				<b>TINGKAT EFEKTIFITAS 100 %</b>						

## Sasaran 2.

### Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah perlu manajemen sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang merupakan aset organisasi atau instansi untuk mencapai tujuannya. Sumber daya yang dimiliki instansi dapat dikategorikan seperti aspek Finansial, Fisik, Manusia dan Kemampuan Teknologi. Dari aspek tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh mempunyai sumber daya yang menjadi suatu kekuatan untuk melaksanakan pelayanan pada masyarakat yaitu :

**Tabel 3.11**  
**Sumber Daya BPBD Kota Payakumbuh Tahun 2020-2022**

No	Sumber Daya	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Sarana dan Peralatan Kebencanaan	Unit/buah	10	10	100	10	10	100			100%
2	Prasana (Gedung Kantor, Gudang Logistik dan Pusdalops)	Paket Gedung	1	0	0	1	1	100	1	0	0%
3	Sumber Daya Manusia (Pelaksana Lapangan)	Orang	20	11	55	20	9	45	32	29	91%

Dari tabel 3.11 dapat dilihat bahwa pada sumber daya sarana dan peralatan kebencanaan dapat terealisasi 0% dari yang direncanakan. Untuk sumber daya prasarana berupa paket gedung kantor, gudang logistik dan pusdalops tidak terealisasi di tahun 2022. Sumber daya manusia (ASN) sebagai pelaksana di lapangan yang targetkan 32 orang dan terealisasi baru 29 orang yang artinya baru 91% ketersediaan tenaga ASN/THL pelaksana lapangan BPBD Kota Payakumbuh yang merupakan personil reaksi cepat tanggap darurat dalam suatu kejadian bencana.

Pencapaian sasaran 2 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.12**  
**Analisis Pencapaian Sasaran**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD**

No	Indikator Kinerja	Satuan Nilai	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Target Akhir Renstra	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Hasil Penilaian AKIP BPBD oleh Inspektorat	Kategori	A	A	100	A	A	100	A	A	100	A	100
		Angka											
Rata-rata Capaian Kinerja									100 %				

Dari tabel 3.12 dapat dilihat bahwa pada Renstra 2017-2022 target hasil penilaian AKIP BPBD oleh Inspektorat, Tahun 2020 Kategori A, Tahun 2021 kategori A dan Tahun 2022 A . Realisasi Tahun 2020 didapat nilai A, Tahun 2022 nilai A Tahun 2022 nilai A dengan rata-rata capaian kinerja 100%

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan belanja langsung adalah sebesar Rp. 616.261.950,-, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 573.618.250,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,08%. Dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 terdapat silpa sebesar Rp. 42.643.700,-. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh pada Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.13**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kota Payakumbuh Tahun 2022**

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Terciptanya Sistem Penanggulangan Bencana yang Handal	616.261.950,-	573.618.250,-	93,08
	<b>Jumlah</b>	616.261.950,-	573.618.250,-	93,08

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh pada Tahun 2022.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.14**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
<b>A.</b>	<b>Misi ,</b>				
1	Melebihi/Melampaui Target			573.618.250,-	93,08
2	Sesuai Target	1	100		
3	Tidak Mencapai Target				

Pencapaian Misi pada Tahun 2022 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2017-2022, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

**Tabel 3.15**  
**Penyerapan Anggaran pada Misi Badan Penanggulangan Bencana**  
**Daerah Kota Payakumbuh 2022**

No.	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-	Selisih	% (dari Pagu Indikatif)
			5		
A.	Misi Terciptanya Sistem Penanggulangan Bencana yang Handal	1.500.404.000,-	886.308.690,-	614.095.310,-	59,07

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efisien dan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mana merupakan upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LkjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
KOTA PAYAKUMBUH



**ERIZON, S. Sos, M.M**  
NIP. 19710627 199803 1 004

# LAMPIRAN / DOKUMENTASI

Dokumentasi Rapat Internal BPBD Kota Payakumbuh  
Hari/tanggal : Kamis/17 Februari 2022



DOKUMENTASI FORUM PERANGKAT DAERAH BPBD  
HARI/TANGGAL : 24 FEBRUARI 2022





DOKUMENTASI PENYUSUNAN KAJIAN RESIKO BENCANA  
TAHUN 2022



DOKUMENTASI LATIHAN GABUNGAN BPBD DAN LINTAS SEKTORAL  
TAHUN 2022





DOKUMENTASI PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA  
TAHUN 2022



## DOKUMENTASI PENANGANAN BENCANA OLEH BPBD TAHUN 2022







**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

**Kota** : Payakumbuh  
**Perangkat Daerah** : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh	Hasil Penilaian AKIP BPBD Oleh Inspektorat	A	A	100
2	Meningkatnya Pelayanan terhadap penanggulangan bencana	Persentase Kelompok masyarakat didaerah rawan bencana yang siap menghadapi Bencana	100%	100%	100%
		Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	100%	100%	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2002 Rp 4.736.321.038

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022 Rp 4.096.272.563

Payakumbuh, Desember 2022  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh



**ERIZON, S.Sos. MM**

Nip. 19710627 199803 1 004

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**TAHUN 2022**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>I</b>	<b>Kepala Pelaksana</b>			
1	Meningkatnya pelayanan terhadap Penanggulangan Bencana	1	Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan Penanggulangan Bencana	100%
<b>II</b>	<b>Sekretaris</b>			
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan BPBD	1	Persentase sasaran , Program dan kegiatan renja PD yang selaras dengan Renstra	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Internal BPBD	2	Persentase sasaran , Program dan kegiatan renja PD yang selaras dengan RKPD	100%
		3	Nilai IKM	89
<b>III</b>	<b>Kasubag Perencanaan</b>			
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Perencanaan BPBD	1	Persentase sasaran capaian kinerja Perencanaan	100%
<b>IV</b>	<b>Kasubag Keuangan</b>			
1	Meningkatnya realisasi keuangan BPBD	1	Persentase capaian realisasi keuangan	100%
<b>V</b>	<b>Kasubag Umum dan Kepegawaian</b>			
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran	1	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%
2	Meningkatnya kualitas SDM BPBD	2	Persentase pemenuhan ASN dalam perangkat daerah sesuai dengan analisa jabatan dan analisis beban kerja	100%
3	Meningkatnya kualitas dokumen pelayanan publik BPBD	3	Persentase ASN yang hadir tepat waktu	100%
4	Meningkatnya layanan kepegawaian	4	Persentase ketersediaan dokumen Kepegawaian lengkap	100%
		5	Persentase pengurusan KGB ASN tepat waktu	100%
<b>VI</b>	<b>Kabid Kedaruratan dan Logistik</b>			
1	Meningkatnya responsibilitas penanganan tanggap darurat	1	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar kapasitas penanganan bencana	100%
		2	Persentase layanan logistik awal kebencanaan	100%
<b>VII</b>	<b>Kasi Kedaruratan</b>			
1	Meningkatnya penanganan saat kejadian bencana	1	Persentase penanganan kejadian saat bencana	12 bulan
<b>VIII</b>	<b>Kasi Logistik</b>			
1	Meningkatnya pelayanan logistik kebencanaan	1	Persentase logistik yang didistribusikan	100%

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>IX</b>	<b>Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>			
1	Menurunnya Resiko Bencana	1	Persentase masyarakat yang siap menghadapi bencana	100%
<b>X</b>	<b>Kasi Pencegahan</b>			
1	Meningkatnya pencegahan resiko bencana	1	Jumlah Aksi Pengurangan Resiko Bencana	5 kecamatan
<b>XI</b>	<b>Kasi Kesiapsiagaan</b>			
1	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	1	Jumlah data dan Informasi Rawan Bencana	5 kecamatan
<b>XII</b>	<b>Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>			
1	Meningkatnya pelayanan pasca bencana	1	Persentase penanganan pasca bencana yang sesuai dengan standar kelayakan dan keselamatan	100%
<b>XIII</b>	<b>Kasi Rehabilitasi</b>			
1	Meningkatnya Pelayanan rehabilitasi pasca bencana	1	persentase rehabilitasi bencana	100%
<b>XIV</b>	<b>Kasie Rekonstruksi</b>			
1	Meningkatnya pelayanan rekontruksi pasca bencana	1	Persentase rekontruksi bencana	100%

Payakumbuh, Oktober 2022  
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Payakumbuh



**ERIZON, S.Sos, M.M**

NIP. 19710627 199803 1 004